

SKRIPSI



**APLIKASI KAUSALITAS GRANGER ANTARA
PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA
DAERAH KASUS KOTA PAYAKUMBUH PERIODE
1990-2009**

Oleh:

FAISAL MARIANAS
BP 05 151 070

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI,
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



No.Alumni Universitas

Faisal Marianas

No.Alumni Fakultas

a) Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/25 Mei 1987 b) Nama Orang Tua : Nasrul, SH (Ayah), Efi Marlina (Ibu) c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 05 151 070 f) Tgl.Lulus : 12 Februari 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,4 i) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Latsitarda V No. 16 Kamp. Baru, Parit Rantang, Kota Payakumbuh.

APLIKASI KAUSALITAS GRANGER ANTARA PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA DAERAH KASUS KOTA PAYAKUMBUH PERIODE 1990-2009

Skripsi S-1 Oleh Faisal Marianas, Pembimbing Dr.Hefrizal Handra,M.Soc.Sc

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kausalitas Granger untuk meneliti pola atau arah hubungan kausalitas antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah kasus Kota Payakumbuh periode 1990-2009. Untuk menghindari terjadinya hubungan korelasi yang lancung (*spurious*), dalam analisis empiris digunakan uji akar unit dan kointegrasi sebagai uji prasarat penggunaan metode kausalitas Granger.

Hasil uji akar unit memperlihatkan bahwa data pendapatan asli daerah dan belanja daerah stasioner pada derajat pertama (*first difference*). Uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Hasil uji kausalitas Granger menyatakan bahwa terjadi kausalitas satu arah (*unidirectional*) dari belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah (kenaikan belanja daerah akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah).

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 12 Februari 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr.Hefrizal Handra,M.Soc.Sc	Zulkifli N, SE, M.Si	Fery Andrianus, SE, M.Si

Mengetahui,
Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing
NIP.130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. (Paidi Hidayat, 2007, hlm. 213).

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang

dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. (Machfud Sidik, 2002 dalam Elfira, 2005, hlm. 11).

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap jenis Dana Perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003 dalam Kusumadewi, 2007, hlm. 68).

Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, Daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. (Hidayat, op.cit., hlm. 214).

Selanjutnya disadari pula bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah yang menghadapi kesulitan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kuantitatif dan deskriptif yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode 1990-2009, perolehan PAD Kota Payakumbuh selalu mengalami peningkatan. Ini terlihat dari perolehan PAD sebesar Rp. 1.717.140.650 pada tahun 1989/1990 menjadi Rp. 32.469.263.423,56 pada tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan tiap tahunnya adalah sebesar 20,12%.
2. Selama periode 1990-2009, porsi belanja daerah Kota Payakumbuh dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Ini terlihat dari belanja daerah yang berjumlah Rp. 5.449.433.650 pada tahun 1989/1990 menjadi Rp. 384.854.724.736 pada tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan tiap tahunnya adalah sebesar 28,29%.
3. Dari pengujian statistik, diketahui bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah (*unidirectional*) yang terjadi antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dimana kausalitas bergerak dari belanja daerah ke pendapatan asli daerah. Hal ini mengandung arti bahwa belanja daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, sedangkan pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi belanja daerah. Hal ini sesuai dengan konsep *spend*

DAFTAR PUSTAKA

- Adicipta. Fahmi, "Aplikasi Kausalitas Granger Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kasus Kota Sukabumi Periode 1983-2002." Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, 2005.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, 1997.
- Elfira. Rika, "Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal Di Indonesia," Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, 2005.
- Gumilar. Gugun, "Analisis Pengaruh Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat," Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
- Jaya Krishnakumar, Mark-Jean Martin, and Nils Soguel, "Application of Granger Causality Tests to Revenue and Expenditure of Swiss cantons," Decembre 2004.
- Khoon, D. M. Mithani and Goh Soo, "Causality between Government Expenditure and Revenue in Malaysia A Seasonal Cointegration Test," *ASEAN Economic Bulletin*, 1999: 68.
- Kuncoro. Haryo, "Causality between Total Government Expenditure, Total Tax Revenue, and Regional Income In The Case of Municipalities/Regency' Local Government In Indonesia," 2007.
- Kuncoro. Haryo, "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 9 No. 1, Juni 2004 Hal: 47 – 63.
- Kuncoro. Mudrajat, *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Kusumadewi. Diah Ayu, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia," *JAAI* Volume 11 No. 1, 2007: 67-80.
- Linda, "Analisis Uji Kausalitas Antara Penerimaan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun Anggaran 1972/73-1998/99," Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, 2003.
- Maimunah. Mutiara, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera," Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, 2008.